

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2015 – 2019
(Studi Kasus di 29 Kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa
Tengah Periode 2015 – 2019)**

RINGKASAN SKRIPSI



Desan Adhi Nugraha

1117 29665

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2021**

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2015-2019

(Studi Kasus di 29 Kabupaten dan 6 Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2019)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DESAN ADHI NUGRAHA

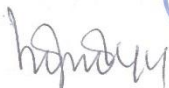
No Induk Mahasiswa: 111729665

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing 1



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Pembimbing 2



Fachmi Pachlevi Yandra, SE., M.Sc., Ak.

Penguji



Baldric Siregar, Prof., Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Yogyakarta, 27 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Widnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2015-2019

(Studi Kasus di 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2019)

DESAN ADHI NUGRAHA

1117 29665

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Teknik pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, sehingga menghasilkan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlah penduduk, dan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 yang telah dipublikasikan oleh situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *cluster sampling* dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel ditentukan berdasarkan kabupaten di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Kesimpulan yang diperoleh pada pengujian ini bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kemiskinan, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini sangat berperan dalam membangun Indonesia menjadi negara maju apabila sumber daya alam dan sumber daya manusia dimanfaatkan secara maksimal. Namun, kenyataannya hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara berkembang dengan sumber daya alam yang kurang dikelola dengan efisien dan sumber daya manusianya kurang produktif.

Hal ini memicu terjadinya suatu masalah besar bagi Indonesia yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang laki – laki dan perempuan atau sekelompok orang tidak terpenuhinya hak – hak dasarnya sehingga tidak mampu mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang layak. Hak – hak dasar yang berlaku secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pekerjaan, pertanahan, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, terjaminnya rasa aman atas ancaman atau perlakuan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tindak kejahatan, dan memiliki hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2004).

Fenomena kemiskinan menjadi permasalahan yang berkaitan dengan adanya ketidakadilan pada perlakuan masyarakat yang dapat mengakibatkan pertentangan dan perpecahan sehingga hal ini dapat memicu kemiskinan yang tidak kunjung usai. Selain itu, adanya disintegrasi kelompok di masyarakat memicu mudarnya kebersamaan antar warga dan melemahnya pola interaksi sosial terhadap sesama.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan menjadi salah satu program prioritas, termasuk bagi Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Bappeda Jateng (2007), dalam upaya mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan lima pilar yang disebut “*Grand Strategy*”.

Dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan masih dapat dikatakan masih jauh dari titik permasalahan. Upaya dalam membuat kebijakan dan program yang telah dilakukan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih banyak terjadi masalah kesenjangan dalam program penanggulangan kemiskinan yang lebih berorientasi pada program sektoral. Sehingga diperlukan suatu strategi yang efisien, terintegrasi, terpadu, dan sinergis supaya masalah ini dapat terselesaikan secara menyeluruh.

Salah satu faktor permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah adalah meningkatnya jumlah penduduk. Karena dapat menimbulkan tidak tercapainya suatu tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat apabila pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan. Menurut ahli pembangunan mengatakan bahwa terjadinya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat juga berdampak pada pengembangan devisa, cadangan devisa, dan sumber daya manusia (Mudrajat, 1997)

Saat ini dengan adanya otonomi daerah dapat melahirkan desentralisasi fiskal. Munculnya desentralisasi fiskal ini mengharuskan pada setiap daerah untuk dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhannya baik dari segi pendapatan dan pengeluarannya. Setiap daerah pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan PAD yang tinggi sehingga menandakan bahwa otonomi daerah berjalan dengan baik.

Pendapatan asli daerah dan belanja daerah merupakan salah faktor penting dalam menanggulangi tingginya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa daerah tersebut dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kenaikan pada jumlah pendapatan asli daerah. Dengan tingginya pendapatan asli daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut dengan alokasi belanja daerah yang baik dan tepat sasaran. Hal ini yang diharapkan oleh masyarakat miskin sehingga dapat terpenuhi hak dasar untuk memiliki kehidupan yang bermartabat.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemiskinan

Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat secara ekonomi memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup rata – rata pada suatu daerah. Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam hal memenuhi standar hidup minimum.

Kemiskinan masih menjadi masalah pada suatu negara termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan yang bersifat kompleks memiliki arti bahwa kemiskinan tidak dapat muncul secara mendadak, sedangkan untuk kemiskinan yang memiliki sifat multidimensi dapat diartikan bahwa melihat dari segi banyaknya kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Hal ini menimbulkan dampak seperti kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang tidak layak, pelayanan kesehatan kurang maksimal, dan pendidikan yang rendah. Kemiskinan dapat diukur dengan tingkat pendapatan yang dikelompokkan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut (Kartasamita, 1996).

Menurut Baswir (1997) terdapat bentuk-bentuk kemiskinan berdasarkan sosial-ekonomis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

Menurut Sumodiningrat (1998) mengatakan bahwa kemiskinan struktural dapat muncul apabila adanya upaya penanggulangan kemiskinan natural, yaitu dengan adanya macam – macam program dan kebijakan.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah terdiri dari semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, hal ini menjadi suatu kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak dapat diperoleh kembali atas pembayarannya oleh Daerah. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Belanja daerah merupakan berbagai macam pengeluaran Kas Daerah pada periode tahun anggaran tersebut terdiri dari belanja rutin (operasional), belanja modal, dan pengeluaran yang terjadi saat mendesak (Setiawan, 2011).

Belanja daerah dapat diartikan sebagai suatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Halim, 2004).

Dalam APBD terdapat berbagai macam jenis belanja secara umum dan dikelompokkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana publik, serta belanja modal.

Jumlah Penduduk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penduduk secara umum merupakan suatu kumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah yang terikat dengan hukum yang berlaku dan saling berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain secara terus – menerus. Penduduk merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan kegiatan ekonomi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan. Disamping itu, bertambahnya penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan yang kompleks. Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh adanya fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan adanya dampak negatif diantaranya meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran, berkurangnya lahan untuk bercocok tanam dan tempat tinggal, meningkatnya polusi udara dan limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, pabrik dan lain – lain, adanya kesulitan dalam persediaan pangan, dan meningkatnya tuntutan untuk pembangunan daerah.

Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu daerah tertentu. Jika dalam suatu daerah tersebut ditempati oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu dapat diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara atau pun bukan (Dr. Kartomo, 2013).

Menurut Devita (2014), pengertian penduduk secara umum merupakan semua orang yang berdomisili pada suatu wilayah geografis kurang waktu enam bulan atau lebih dengan tujuan untuk menetap pada daerah tersebut.

Data kependudukan dapat diperoleh melalui sensus penduduk, survei, dan registrasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) secara umum dapat diartikan sebagai suatu pendapatan yang memperlihatkan kemampuan pada daerah dalam menghimpun dana dan untuk membiayai segala kegiatan pembangunan pada wilayah tersebut. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri dan dalam pemungutannya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik harus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2002). Ketergantungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat dilihat dari segi besarnya PAD yang diperoleh. Apabila PAD yang didapat semakin besar maka pemerintah daerah lebih leluasa untuk mengalokasikan pendapatan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat tanpa ada banyak campur tangan dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat daerah tersebut (Zul Fadhly, 2013).

Sumber-Sumber PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 adalah pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) dijelaskan bahwa otonomi dapat diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Sedangkan untuk otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

segala aktivitas pada rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat yang berada pada wilayah tersebut menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 tahun 1999). Adanya pelaksanaan otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam mengkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut terutama adanya peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan dampak yang positif bagi setiap daerah untuk melaksanakan kewenangannya dengan leluasa. Otonomi daerah berdampak pada pembangunan ekonomi perkotaan dan pedesaan yang mengalami peningkatan dikarenakan adanya pemertaan untuk daerah tersebut untuk berkembang, dan pemerintah pusat tidak terlalu campur tangan sehingga dalam pengambilan keputusan pada peraturan atau kebijakan pemerintahan daerah tidak harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan komponen pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memaksimalkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membangun daerah yang dipimpinnya.

Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan suatu ukuran besarnya pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan minimum berupa makanan, non-makanan, atau sebagai standar bahwa batas seseorang yang dapat dikatakan miskin yang dipandang dari sudut konsumsi (Whisnu, 2011). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2010), bahwa untuk mengukur kemiskinan yaitu dengan melihat tingkat penghasilan masyarakat yang dihitung perorangan Rp7.057 per hari. Perhitungan tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan non makanan. Kebutuhan makanan menggunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan untuk non makanan berupa pengeluaran untuk biaya perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ukuran kemiskinan menurut *World Bank* bahwa kemiskinan dapat diukur berdasarkan pendapatan per kapita. Kategori miskin berdasarkan *World Bank* jika pendapatan perkapita kurang dari rata-rata pendapatan perkapita nasional. Oleh karena itu, ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Rumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riko Tri Fasholla (2018), jika PAD pada suatu daerah meningkat, maka jumlah kemiskinan pada suatu daerah tersebut menurun. Diharapkan dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, membangun industri kreatif, atau menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2019.

Pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan

Berdasarkan penelitian dari Riry Isramiwarti, M. Rasuli & Taufeni Taufik (2017), bahwa belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Diharapkan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dan merealisasikan anggaran tepat sasaran sehingga dapat menuntaskan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H2 : Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2019.

Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riko Tri Fasholla (2018), adanya peningkatan jumlah penduduk maka jumlah kemiskinan semakin bertambah dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Todaro (2000), adanya pengaruh positif jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Dibuktikan dengan perhitungan *indeks Foster Greer Thorbecke* (FGT), yang menyebutkan bahwa penduduk mengalami kenaikan maka sejalan dengan kenaikannya jumlah kemiskinan.

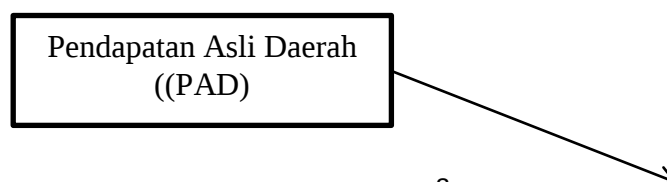
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H3 : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2019.

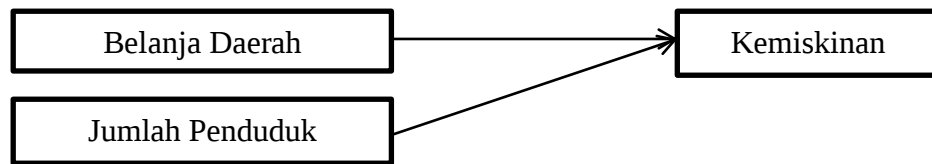
Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada pengembangan hipotesis dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data panel yaitu *cross section* pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah dan *time series* pada tahun 2015-2019. Selain itu, penelitian ini menggunakan kuantitatif dan *Cluster sampling* di mana sampel dikumpulkan berdasarkan kriteria suatu daerah dan setiap daerah tersebut dapat dipilih menjadi sampel. Sampel yang digunakan yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada kabupaten dan kota tahun 2015-2019 dan populasinya 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah data yang akan diteliti adalah 175 data. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan SPSS Versi 15.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang memiliki arti yaitu data yang sudah tersedia untuk digunakan atau diolah yang bersumber dari badan/organisasi tertentu. Sumber data PAD berasal dari Laporan Realisasi Anggaran APBD (DJPK). Sedangkan untuk Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kemiskinan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (BPS Jateng). Kemudian data yang diperoleh tersebut akan disatukan dan dianalisis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Variabel Dependen

Kemiskinan

Kemiskinan secara umum merupakan suatu kondisi dimana pada suatu daerah atau wilayah yang masyarakatnya secara ekonomi memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan yang tidak dapat dibatasi mengakibatkan lemahnya ekonomi masyarakat pada daerah tersebut. Berdasarkan sudut pandang ekonomi kemiskinan dapat diukur dari biaya untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan non makanan.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa suatu penerimaan yang diterima daerah serta pemungutannya diatur dalam peraturan daerah yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain PAD yang Sah

Belanja Daerah

Belanja Daerah secara umum memiliki definisi sebagai suatu pengeluaran yang dianggarkan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pemerintahannya. Pengelompokan belanja daerah dibagi menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Modal, Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Belanja Transfer, serta Belanja Tak Tersangka.

Jumlah Penduduk

Penduduk secara umum dapat diartikan sebagai orang yang bertempat tinggal pada suatu lingkungan dengan terikat aturan-aturan yang berlaku pada wilayah tersebut dan memiliki hubungan satu sama lain secara berkelanjutan. Jumlah penduduk dapat dihitung setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_t = (L - M) + (I - E)$$

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Analisis Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
PAD	152.044.596.332,00	2.066.333.418.588,00	358.075.690.919,30	252.594.737.238,37
Belanja Daerah	883.184.895.000,00	5.297.500.446.000,00	2.256.001.497.840,00	729.430.246.350,15
Jumlah Penduduk	120.792	1.814.110	978.629,37	416.582,46
Kemiskinan	9.100	352.000	121.003,43	70.543,04

Berdasarkan tabel tersebut memaparkan hasil olahan variabel PAD di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 dengan nilai mean Rp358.075.690.919,30 dan nilai standar deviasi sebesar Rp252.594.737.238,37. Nilai minimum diduduki oleh Kota Pekalongan tahun 2015 sebesar Rp152.044.596.332, sedangkan untuk nilai maksimum diduduki oleh Kota Semarang tahun 2019 sebesar Rp2.066.333.418.588.

Variabel belanja daerah memiliki nilai mean dan standar deviasi masing-masing sebesar Rp2.256.001.497.840 dan Rp729.430.246.350,15. Kota Pekalongan tahun 2018 memperoleh nilai minimum sebesar Rp883.184.895.000 dan Kota Semarang tahun 2016 dengan nilai maksimum sebesar Rp5.297.500.446.000.

Variabel jumlah penduduk memperoleh nilai mean sebesar 978.629,37 jiwa dan dengan nilai standar deviasi sebesar 416.582,46 jiwa. sedangkan untuk nilai maksimum dan nilai minimum diduduki oleh Kota Semarang tahun 2019 dengan jumlah 1.814.110 jiwa dan Kota Magelang tahun 2015 dengan 120.792 jiwa.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel jumlah kemiskinan memiliki nilai mean sebesar 121.003,43 jiwa dan standar deviasinya 70.543,04 jiwa. sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 352.000 jiwa pada Kabupaten Brebes tahun 2015 dan nilai minimum sebesar 9.100 jiwa pada Kota Magelang tahun 2019.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

N	155
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,354
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	1,000

Berdasarkan hasil olahan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,354 dengan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 1,000. Nilai signifikansi $1,000 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan memenuhi prasyarat uji asumsi klasik.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Simpulan
PAD	0,541	1,848	Tidak ada Multikolinearitas
Belanja Daerah	0,112	8,910	Tidak ada Multikolinearitas
Jumlah Penduduk	0,144	6,947	Tidak ada Multikolinearitas

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang sebelumnya telah diuji outlier dan mengubah skala data dengan logaritma natural. Sehingga disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami multikolinearitas dan memenuhi prasyarat uji asumsi klasik.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Simpulan
PAD	0,471	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Belanja Daerah	0,533	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Jumlah Penduduk	0,551	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil dari uji heteroskedastisitas yang sebelumnya telah di uji outlier dan data tersebut ditransform ke dalam bentuk logaritma natural. Hasil diatas diketahui memiliki nilai signifikansi masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi prasyarat uji asumi klasik.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

N	155
DW	1,856
dL	1,6982
dU	1,7770
4-dL	2,3018
4-dU	2,2230
Simpulan	Tidak Terdapat Autokorelasi

Hasil uji pada tabel diatas memberikan kesimpulan bahwa penelitian ini tidak mengandung autokorelasi, dikarenakan dari hasil uji tersebut nilai dU 1,7770 lebih rendah dari DW 1,856 dan nilai DW lebih rendah dari nilai 4-dU yaitu 2,2230 ($dU < DW < 4-dU$).

Uji Hipotesis

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficients	Std. Error
Constant	-12,977	3,774
LnPAD	-0,576	0,092
LnBelanja Daerah	0,944	0,205
LnJumlah Penduduk	0,944	0,096

Hasil olah data diatas menggunakan data yang sebelumnya telah di uji outlier dengan menghapus data yang ekstrim sebanyak 20 data dan data tersebut di transform menjadi logaritma natural.

Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat dirumuskan persamaan linear regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{LnKemiskinan} = -12,977 - 0,576 \text{ LnPAD} + 0,944 \text{ LnBelanja Daerah} + 0,944 \text{ LnJumlah Penduduk} + e$$

sesuai dengan persamaan linear regresi diatas, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

Koefisien regresi pada Ln PAD senilai 0,576 yang bertanda negatif maka dapat diartikan jika PAD mengalami pertambahan sebesar 1% maka jumlah kemiskinan akan mengalami penurunan sebanyak 0,576%.

Pada Ln belanja daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,944 yang bertanda positif, sehingga disimpulkan bahwa jika belanja daerah mengalami pertambahan 1% maka jumlah kemiskinan mengalami pertambahan sebanyak 0,944%.

Koefisien regresi pada Ln jumlah penduduk senilai 0,944 yang bertanda positif, sehingga menandakan bahwa jika jumlah penduduk mengalami pertambahan senilai 1% maka akan mengalami pertambahan pada jumlah kemiskinan sebanyak 0,944%.

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Coefficients	T hitung	T tabel	Sig.
PAD	-0,576	-6,274	1,976	0,000
Belanja Daerah	0,944	4,594	1,976	0,000
Jumlah Penduduk	0,944	9,822	1,976	0,000

Berdasarkan hasil dari tabel 7 dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai T hitung variabel PAD yang bertanda negatif dengan nilai absolut $6,274 > t$ tabel $1,976$ dan nilai koefisien yang bertanda negatif $0,576$. Nilai koefisien negatif memiliki hubungan berlawanan arah dengan kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Belanja daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $4,594 > t$ tabel $1,976$ serta memiliki nilai koefisien positif sebesar $0,944$. Nilai koefisien positif menandakan hubungan searah dengan kemiskinan.

Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $9,822 > t$ tabel $1,976$ dan memiliki nilai koefisien positif sebesar $0,944$. nilai koefisien positif menunjukkan hubungan searah dengan kemiskinan.

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

F	409.183
Sig.	0,000

Hasil dari olah data yang dilakukan menggunakan uji F menghasilkan bahwa nilai F hitung $409,183$ lebih tinggi dari F tabel yaitu sebesar $2,66$. Hasil ini tidak ada alasan untuk menerima H_0 sehingga hal ini dapat diartikan bahwa menolak H_0 dan menerima H_1 . Maka dapat disimpulkan antara variabel independen (PAD, belanja daerah, dan jumlah penduduk) secara bersamaan mampu menjelaskan variabel dependen (kemiskinan).

Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi (R²)

N	Multiple R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
155	0,944	0,890	0,888	0,25242

Hasil olah data menggunakan uji koefisien determinasi tersebut menghasilkan nilai adjusted R square senilai $0,888$ atau $88,8\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen (PAD, belanja daerah, dan jumlah penduduk) sebesar $88,8\%$, melainkan sisanya yaitu sebesar $11,2\%$ dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendapatan asli daerah (PAD) diartikan sebagai suatu penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang memiliki tujuan untuk menghidupi atau membiayai segala macam aktivitasnya salah satunya adalah untuk memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat dengan meningkat kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa PAD yang dikelola oleh pemerintah daerah telah dialokasikan dengan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD yang didapatkan dari berbagai sumber yang mengalami kenaikan maka akan wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dalam mengelola semua sumber daya yang ada yang disalurkan melalui belanja modal. Maka dari itu, bertambah banyak PAD yang didapatkan maka semakin tinggi pula belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, sehingga hal ini dapat memicu menurunnya jumlah kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Riko Tri Fasholla (2018) yang mengutarakan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, berarti PAD yang mengalami kenaikan mampu berkontribusi dalam APBD sehingga berdampak pada kemampuan lebih untuk membiayai seluruh belanja modal yang akan menurunkan jumlah kemiskinan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Sesuai dengan perhitungan uji t dengan nilai t hitung variabel PAD yang bertanda negatif dengan nilai absolut $6,274 > t$ tabel $1,976$ dan nilai koefisien yang bertanda negatif $0,576$, sehingga hipotesis terdukung.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan

Belanja daerah merupakan suatu pembiayaan pada seluruh aktivitas rumah tangga pada pemerintah daerah. Belanja daerah juga sebagai wujud dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Dengan adanya belanja daerah yang dialokasikan secara merata dan tepat sasaran, diharapkan mampu menyejahterakan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini kenyataannya menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Riko Tri Fasholla (2018) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena alokasi belanja daerah yang dilakukan pemerintah banyak yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, anggaran terbanyak pada belanja pegawai, perjalanan dinas, dan jasa kantor sehingga alokasi yang digunakan untuk pembangunan sangat terbatas, dan belanja daerah tersebut hanya terfokus pada salah satu wilayah sehingga perkembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang tidak merata. Menurut Awan Santosa sebagai peneliti Pusat Studi Kerakyatan UGM Yogyakarta mengatakan bahwa dengan adanya politik anggaran belum dapat berjalan secara produktif. alokasi *budget* tidak terfokus pada belanja sektor riil yang berhubungan dengan ekonomi warga.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019. Kesimpulan ini berdasarkan hasil dari uji t hitung

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

$4,594 > t$ tabel $1,976$ dengan nilai koefisien positif senilai $0,944$, sehingga hipotesis tidak terdukung.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan

Penduduk merupakan suatu kelompok yang bertempat tinggal di wilayah tertentu dengan tujuan untuk menetap dan terikat pada suatu peraturan yang berlaku dan berhubungan antar orang dengan yang lain. Pada penelitian ini terlihat bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, yang berarti telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tidak dapat dikendalikan secara maksimal. Hal ini dapat terjadi karena adanya tingkat kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian pada suatu daerah. Maka dari itu sangatlah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat jika tidak segera dikendalikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan adanya kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah kemiskinan yang akan terjadi. Banyaknya penduduk namun tidak diimbangi dengan adanya perbaikan kualitas hidup, tingkat pendidikan, dan terbuka lapangan pekerjaan akan menambah jumlah kemiskinan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan Riko Tri Fasholla (2018) dan Whisnu Adhi Saputra (2015) yang menerangkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Penelitian ini memperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Kesimpulan ini berdasarkan pengujian dengan nilai t hitung $9,822 > t$ tabel $1,976$ dan dengan nilai koefisien positif sebesar $0,944$, sehingga hipotesis terdukung.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil uji serta pembahasan yang telah dikerjakan oleh peneliti, kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Hal ini didapat berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dengan t hitung yang bertanda negatif dengan nilai absolut $6,274 > \text{nilai tabel } 1,976$ dengan nilai koefisien negatif sebesar $0,576$. Menurut perhitungan tersebut disimpulkan bahwa PAD mampu menurunkan jumlah kemiskinan seiring dengan meningkatnya PAD. Peningkatan PAD dapat dikatakan bahwa pada daerah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui alokasi belanja daerah yang tepat sasaran sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
2. Belanja daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019. Hasil ini dibuktikan dengan uji parsial (uji t) dengan nilai t hitung sebesar $4,594 > t$ tabel $1,976$ dengan nilai koefisien positif sebesar $0,944$. Oleh karena itu, menurut hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jika daerah mengalami

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peningkatan belanja daerah, maka jumlah kemiskinan yang terjadi akan semakin meningkat. Hal ini sangat disayangkan karena *budget* untuk pembangunan hanya sedikit dibandingkan dengan belanja yang lain dan alokasi belanja daerah yang kurang tepat sasaran sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

3. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019. Kesimpulan ini berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dengan nilai t hitung $9,822 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,976$ dengan nilai koefisien positif sebesar 0,944. Menurut perhitungan tersebut kesimpulan yang didapat diambil yaitu jika jumlah penduduk mengalami peningkatan maka jumlah kemiskinan yang terjadi akan meningkat. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan memicu masalah-masalah baru baik bidang ekonomi ataupun sosial.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya:

1. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak bisa digunakan untuk penelitian serupa pada provinsi lain yang ada di Indonesia, karena peneliti hanya menggunakan populasi Provinsi Jawa Tengah pada kabupaten/kota.
2. Penelitian ini hanya memakai data sekunder yang bersumber dari situs Badan Pusat Statistik dan direktorat jenderal perimbangan keuangan sehingga sangat bergantung pada laporan realisasi anggaran APBD dan sensus.

Saran

Berdasarkan hasil yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, peneliti bermaksud memberikan saran antara lain:

1. Pemerintah daerah pada kabupaten/kota yang bernaung pada Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola PAD sudah dapat dikatakan baik, namun untuk pengalokasian belanja daerah lebih ditegaskan dan jelas tujuannya serta perlu adanya peraturan yang ketat sehingga biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan daerah dapat sejalan dengan tujuannya dan biaya tersebut dipergunakan sebaik mungkin dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta perkembangan infrastruktur yang berguna bagi masyarakat.
2. Menurunnya tingkat kemiskinan pada suatu daerah sebagai tanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan, sehingga sebaiknya hal ini menjadi perhatian untuk pemerintah daerah dalam memberantas kemiskinan di daerahnya. Pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mampu menurunkan jumlah kemiskinan.
3. Pemerintah daerah juga harus tegas dalam pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, dengan melakukan program keluarga berencana (KB), serta undang-undang batas minimal perkawinan. Sehingga hal ini diharapkan mampu mengurangi laju pertumbuhan penduduk.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Ditujukan untuk peneliti selanjutnya diharapkan memakai variabel berbeda yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan maka hasil penelitian selanjutnya lebih tepat dan sempurna. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan sampel yang berbeda untuk mengetahui perkembangan suatu daerah yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2015-2019*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Badan Pusat Statistik Jateng. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 1996-2019*.
<https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/29/93/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-1996-2018.html>
- Bappeda Jateng. (2007). *Dukungan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberantasan Kemiskinan*.
- Bappenas. (2004). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*.
- Baswir, R. (1997). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Pustaka Pelajar.
- Dana, D. A. N., Terhadap, P., Miskin, P., Kabupaten, D. I., & Firmansyah, A. K. (2015). *Digital Repository Universitas Jember*.
- Devita, D. J. dan. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70.
- Fasholla, R. T. (2018). *Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011-2016 (Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2016)*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Salemba Empat.
- Halim, A. dan S. A. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi, Oktober 2003*.
- Isramiwarti, Riry, M. R. & T. T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213.
- Kartasamita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES.
- KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2001). *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andi.

Mudrajad, K. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan* (ketiga). Penerbit UPP AMP YKPN.

Novaranti, N. (2016). Pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal. *Universitas Bandar Lampung.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah.*

Setiawan, A. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Studi Pada Provinsi Jawa Tengah. *Semarang: Universitas Diponegoro.*

Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat.* Pustaka Pelajar.

Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1–18.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Terjemahan Erlangga.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun. (2004). *Undang-Undang 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.*

Zulfadhly. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–15.
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2978>